

**PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* DALAM
PERJANJIAN HAJI DAN UMRAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada PT Zulian Kamsindo Tour &
Travel)**

Oleh
Dinda Noer Fadzilah
NIM 170574201042

Abstrak

Pandemi *covid-19* menjadi penyebab utama munculnya pembatalan pemberangkatan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji, khususnya travel ibadah haji plus masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemenuhan prestasinya selaku pelaku usaha, seperti travel Zulindo di Kota Tanjungpinang yang tidak memenuhi prestasinya terhadap jamaah haji plus selaku konsumen seperti yang telah disepakati bersama dalam sebuah perjanjian pemberangkatan haji dimasa berakhirnya pandemi *covid-19*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta menganalisis apakah pandemi *covid-19* ini bisa dijadikan alasan dalam pembatalan pemberangkatan ibadah haji yang mana dikategorikan sebagai *force majeure* serta bentuk perlindungan hukum terhadap para jamaah haji plus yang gagal berangkat Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan mengkaji untuk mempertimbangkan penerapan atau menempatkan Undang-Undang dan dokumen tertulis kedalam tindakan pada kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, thesis, peraturan perundang-undangan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan permasalahan yang terjadi masuk dalam kategori unsur *force majeure* realtif, yang mana keadaan debitur yakni PT Zulian Kamsaindo dapat memenuhi kewajiban di waktu yang lain, sebab Pandemi Covid-19 tidak dapat dijadikan sebuah sarana untuk menunda kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian tanpa adanya suatu negosiasi serta dilaksanakannya lah perlindungan hukum secara represif diantara travel Zulindo dengan jamaah haji plus. Penyelesaian jalur non-litigasi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi jamaah haji plus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya negosiasi antara pelaku usaha yakni PT Zulian Kamsaindo dengan konsumen yaitu jamaah haji yang batal akan keberangkatan yakni jamaah haji memilih penjadwalan kembali keberangkatan ibadah haji atau pengembalian dana sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama dari awal antara Zulindo dan jamaah haji tersebut.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pandemi Covid-19, Travel Haji

**PANDEMIC COVID-19 AS A REASON FOR FORCE MAJEURE IN HAJJ
AND UMRAH AGREEMENTS VIEWED FROM CONSUMER
PROTECTION LAW (Study at PT Zulian Kamsindo Tour & Travel)**

By

Dinda Noer Fadzilah
NIM 170574201042

Abstract

The Covid-19 pandemic is the main cause for the cancellation of the departure of the pilgrimage. The implementation of the pilgrimage, especially the pilgrimage plus travel, still has discrepancies in fulfilling its achievements as a business actor, such as Zulindo travel in Tanjungpinang City which did not fulfill its achievements for pilgrims plus as consumers as mutually agreed in an agreement on the departure of the pilgrimage at the end of the covid-19 pandemic. 19. This study aims to find out and analyze whether the Covid-19 pandemic can be used as an excuse for canceling the departure of the pilgrimage which is categorized as a force majeure as well as a form of legal protection for pilgrims plus who fail to depart. This type of research is empirical normative legal research by reviewing to consider the application or placing of laws and written documents into action in cases that occur in society. The data in this study were obtained through official documents, books related to the research object, research results in the form of reports, theses, laws and regulations and interviews. The results of this study indicate that the problems that occur fall into the category of relative force majeure elements, in which the condition of the debtor, namely PT Zulian Kamsaindo, can fulfill obligations at other times, because the Covid-19 Pandemic cannot be used as a means to postpone the obligations of one of the parties to the agreement without the existence of a negotiation and the implementation of repressive legal protection between Zulindo travel and pilgrims plus. Completion of the non-litigation route is a form of legal protection for the pilgrims plus which has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Negotiation efforts between business actors, namely PT Zulian Kamsaindo and consumers, namely pilgrims who cancel their departure, namely pilgrims choosing to reschedule the departure of the pilgrimage or refund according to the conditions specified in the agreement that was mutually agreed upon from the beginning between Zulindo and the pilgrims .

Keywords: *Legal Protection, Covid-19 Pandemic, Hajj Travel*